

# Interaksi Aktor dalam Pengelolaan Objek Wisata Cekingan di Kabupaten Gianyar

A.A. Meydita Oka Amiyura<sup>1)</sup>, Bandiyah<sup>2)</sup>, Andreas Noak<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [aameyditaa@gmail.com](mailto:aameyditaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [dyah\\_3981@yahoo.co.id](mailto:dyah_3981@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [piersandreasnoak@unud.ac.id](mailto:piersandreasnoak@unud.ac.id)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This study aims to answer a problem formulation the interaction of actors in managing the tourist attraction of Cekingan. First, the interaction between BPOWC and farmers. The second is BPOWC's interaction with restaurant and art shop entrepreneurs in Cekingan Tourism Object. Third, BPOWC with the Ludden House Community. This research uses Marxism Political Economy Theory and collaborative governance theory. The research method is a descriptive qualitative method. The results of this research are First; conflicts regarding compensation distribution and. Second; especially for residents outside Tegallalang Village by collecting payments. Third; the Ludden House Community is chaired by Gede Suanda, namely the removal of the Bali Not For Sale board by the manager and Bendesa Pakraman. The findings indicate that the management of the two classes is divided. The results of the application of collaborative governance have not involved stakeholders from Kedisan Village in management*

**Keywords:** Interaction Actor, Management, Cekingan Tourism.

## 1. PENDAHULUAN

Objek Wisata Cekingan merupakan salah satu destinasi wisata wajib dikunjungi, hamparan sawah terasering yang menjadi keunggulan objek wisata ini membuat para wisatawan terpujau akan keindahannya, yang menarik dari objek wisata ini adalah lokasinya yang berada di Banjar Tegallalang, Desa Tegallalang. Sesuai dengan Perda Gianyar nomor 10 tahun 2013 yaitu desa pakraman diberikan wewenang untuk mengelola Objek Wisata Cekingan, diterbitkannya perda tersebut menjadi payung hukum desa pakraman dan masyarakat, dengan membentuk badan pengelola yang bernama Badan Pengelola Objek Wisata Cekingan (BPOWC), pembentukan BPOWC sendiri

bertujuan membantu pihak desa pakraman dalam pengelolaan wisata Cekingan. peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung, seperti pada tahun 2018 tercatat sudah ada 23 ribu wisatawan yang berkunjung setiap bulannya yang dimana pada periode tahun sebelumnya hanya mencapai 13 ribu pengunjung setiap bulannya, dan total wisatawan tahun 2018 sebanyak 305.375 pengunjung (BPOWC, 2019).

Atas persetujuan pihak bendesa pakraman, BPOWC melakukan peminjaman modal awal ke LPD Tegallalang untuk pembangunan wilayah khusus areal parkir, dari peminjaman dari LPD, pihak pengelola mendapatkan modal tanah yang awalnya hanya seluas 25

are, menjadi 35 are dengan penambahan sebanyak 10 are yang diberikan oleh warga Desa Pakraman Tegallalang, Dewa Putu Oka yang juga menjadi pencetus terbentuknya objek wisata cekingan, lahan tersebut diperuntukan sebagai lahan parkir, selain pemberian modal tanah, pada tahun 2011 Dewa Putu Oka yang juga merangkap sebagai bendahara badan pengelola, memberikan bantuan modal untuk menyewa lahan petani yang saat itu masih sebesar Rp 500.000, dimana dalam penyewaannya melibatkan 7 petani penggarap yang lahannya disewakan ke pihak pengelola, serta pembangunan sarana kantor BPOWC dan pembangunan jembatan yang dikhususkan sebagai jalur tracking sebagai salah satu kegiatan yang bisa dilakukan bagi para wisatawan yang berkunjung, hal ini dilakukan atas dasar pengembangan Wisata Cekingan yang dapat menambah ketertarikan wisatawan dan dari penambahan wisatawan sehingga mampu memutar roda perekonomian di kawasan Objek Wisata Cekingan.

Namun terdapat permasalahan disini, yaitu sebelumnya dikatakan bahwa pemandangan objek wisata ini berada di sisi timur yang dimana Desa Tegallalang (bagian barat), sisi bagian barat yang merupakan sisi Desa Tegallalang fokus pada pembangunan sektor ekonomi dimana masyarakat sekitar objek wisata bagian barat mampu mendapatkan keuntungan dari kedatangan para wisatawan baik itu mancanegara maupun wisatawan lokal, pembangunan justru disebabkan karena kepemilikan lahan tanah yang menjadi hak pribadi sehingga membuat pembangunan di kawasan tersebut menjadi tumpang tindih,

karena menjadi lokasi terbaik untuk dapat menikmati pemandangan sawah terasering Sehingga selain mengenai pembangunan kawasan ekonomi yang semakin pesat, terjadinya konflik antara pihak pengelola dan pihak petani, yang mengakibatkan pemasangan cermin dan seng di lahan sawah milik petani yang dimuat dalam berita (NusaBali, 4 Agustus 2017), petani dianggap menjadi penikmat terakhir dan sedikit mendapatkan bagian dari perekonomian pariwisata karena pemberian kompensasi yang diberikan oleh pihak pengelola dan adanya komunitas yang turut serta membantu dalam pengajuan aspirasi petani yang bernama Luden House diketua oleh Gede Suanda dan memasang karya seni Bali Not For Sale sebagai bentuk protesnya, hal ini menjadikan dasar untuk peneliti melihat dan mengetahui bagaimana interaksi aktor dalam pengelolaan Objek Wisata Cekingan, dengan menggunakan Teori Ekonomi Politik *Karl Marx* dan teori *collaborative governance*.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian tentang interaksi aktor dalam Pengelolaan Objek Wisata Cekingan melalui beberapa penelitian/buku telah cukup banyak dilakukan. Penulis menyertakan beberapa penelitian ilmiah yang dilakukan sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan Objek Wisata Cekingan dan interaksi aktor. Bagian ini membahas tentang konsep-konsep yang sesuai dengan topik, judul, dan fokus penelitian. Adapun rujukan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memperkuat penelitian ini adalah pertama, Muhammad Imam Fuadi (2014). Kedua, *Community Based Tourism (CBT) Sebagai Strategi*

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di DTW Ceking Desa Pakraman Tegallalang (2020). Ketiga, Leano Monkoggi Keempat, Interaksi antar Aktor dalam Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang (Studi Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang).

### **3. METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang dilakukan untuk mendapatkan data mendalam, pendekatan penelitian yang untuk menggambarkan dan menganalisis, menghasilkan temuan. Peneliti memilih metode kualitatif karena metode tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan, untuk mendapatkan informasi mendalam dan menganalisis temuan. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, waktu penelitian dialokasikan selama 2 bulan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Interaksi BPOWC dengan Petani Objek Wisata Cekingan**

Objek Wisata Cekingan memiliki 3 element didalamnya, yaitu petani, kemudian Komunitas Luden House sebagai civil society dan terakhir adalah pengusaha restaurant dan artshop. Dalam hasil penelitian ini akan menjabarkan interaksi masing-masing antara BPOWC selaku pihak pengelola dengan ketiga element objek wisata.

Interaksi BPOWC dengan pihak petani dimulai dengan pertemuan pihak pengelola dengan 7 petani, dimana pengelola akan

memberikan kompensasi bagi petani untuk biaya penyewaan, perawatan dan view. Biaya kompensasi tersebut sudah dibicarakan sejak tahun 2011, sebelumnya pada tahun tersebut kompensasi dibayarkan sebesar Rp 500.000 setiap bulannya, kemudian hingga saat ini mencapai Rp 4.500.000/bulannya. Kenaikan biaya kompensasi tersebut tidak selalu berjalan mulus, karena setiap kenaikannya justru dilakukan dengan protes pemasangan cermin dan seng di bagian areal sawah sehingga pihak pengelola akan menemui pihak petani, karena pihak petani sebelumnya sudah berusaha berbicara dengan pihak pengelola mengenai kenaikan biaya kompensasi namun tidak mendapatkan tanggapan.

Telah ada sebuah dialog yang membahas adanya pemberian kompensasi antara BPOWC dan pihak petani sebagai pemilik sawah mendapatkan Rp 4.500.000/bulan selama 1 tahun dan diharuskan untuk mempertahankan sawah mereka. Hal ini dilakukan agar menjaga keistimewaan Objek Wisata Cekingan yaitu keindahan sawah berundak yang tidak banyak dimiliki di daerah lainnya. Perjanjian tersebut menjadi dasar bagi pihak pengelola untuk dapat terus mempertahankan Objek Wisata Cekingan, dan mendapatkan hak penyewaan lahan sawah yang menjadi objek pariwisata.

Selama pelaksanaan pemilihan yang sudah dilakukan selama 2 kali, belum adanya perwakilan dari Desa Kedisan yang dimana sebaiknya juga dilibatkan dalam struktur organisasi, karena bagaimana pun juga, Desa Kedisan khususnya para pemilik lahan sawah juga memiliki kontribusi besar dalam Objek Wisata Cekingan. Dalam Objek Wisata

Cekingan ada 2 element krusial yaitu para pengusaha dan petani pemilik lahan sawah, namun pada pengusaha sendiri sudah mendapat keuntungan besar sejak adanya Objek Wisata Cekingan, hal ini dibuktikan dengan penghasilan pengusaha artshop dan restaurant yang bisa menghasilkan Rp 500.000- Rp 2.000.000 perharinya (hasil wawancara dengan pengusaha artshop dan restaurant), tetapi sayangnya justru petani yang menyediakan lahan serta view bagi Objek Wisata Cekingan hanya mendapat sedikit bagian dari pariwisata ini, hal ini dibuktikan dengan tidak disepakatinya penambahan jumlah biaya sewa lahan perbulan, yang pada awalnya sebanyak Rp 4.000.000 lalu petani menyarankan untuk dinaikan agar menjadi menjadi Rp 5.000.000 per bulannya, namun hal tersebut tidak disanggupi oleh pihak pengelola sehingga pihak pengelola hanya mampu menaikkan jumlah sebesar Rp 500.000 sehingga totalnya menjadi Rp 4.500.000 per bulannya.

Petani menjadi bagian penting dalam Objek Wisata Cekingan, sehingga melihat bagaimana petani seharusnya mendapatkan hak yang layak dari pengelola, untuk dapat mempertahankan keindahan alam yang menjadi point utama yang objek tersebut. Dari pernyataan diatas mengenai negosiasi petani dengan pengelola objek wisata untuk melakukan kenaikan biaya "pemeliharaan" tentu bisa dilihat bahwa badan pengeleola melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah mengenai kompensasi. Dalam wawancara dengan salah satu petani di desa Kedisan yang merupakan pemilik lahan sawah beliau bernama Bapak Wayan Gi selaku petani.

Penetapan pelaksanaan pengelola Objek Wisata Cekingan yang sudah diserahkan sepenuhnya kepada desa pakraman dan pengelola tidak memberikan keuntungan baik petani sebagai pemegang utama dalam roda pergerakan pariwisata di Objek Wisata Cekingan itu sendiri, hal ini mengakibatkan sering terjadinya pergesekan antara petani dan pihak pengelola. Sejauh ini pihak pemerintah kecamatan sempat melakukan mediasi antara petani dan pihak pengelola yaitu BPOWC agar tidak adanya tindakan yang justru dapat merusak citra Objek Wisata Cekingan dimata para wisatawan. Mediasi yang dilakukan pemerintah kecamatan adalah mempertemukan perwakilan perkumpulan petani di Desa Kedisan dengan pihak pengelola yaitu BPOWC didampingi Bendesa Pakraman Desa Tegallalang, dimana permasalahan yang kerap terjadi mengenai pembagian biaya pengelolaan sawah di wilayah Objek Wisata Cekingan, dan petani pengelola meletakkan cermin di kawasan sawah mereka, dengan tujuan untuk menghalangi pemandangan bagi para wisatawan karena cermin akan memantulkan cahaya sehingga mengganggu pandangan wisatawan, kejadian tersebut berlangsung pada bulan maret 2020.

Kantor camat, menjadi tempat mediasi dalam permasalahan antara petani dan pihak pengelola, yang dimana sebaiknya kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang sama karena pihak pengelola membutuhkan pemandangan sawah sehingga seharusnya pihak petani menjadi prioritas utama mereka, agar kelestarian alam yaitu sawah terasering yang menjadi objek wisata utama menjadi terawat dan asri, begitu pula dengan pihak

petani yang juga harus bisa bekerja sama dengan pihak pengelola sehingga menjadikan Objek Wisata Cekingan menjadi tertata dan dikelola dengan baik.

Selama pandemi corona, pihak petani sempat melakukan protes kembali dengan memasang seng dan cermin, sehingga pertemuan dengan pihak pengelola kembali dilakukan, hal ini dikarenakan selama pandemi berlangsung tidak adanya pergerakan ataupun kepastian terhadap pembayaran biaya kompensasi. Sehingga diadakan pertemuan yang difasilitasi dan diikuti oleh Camat Tegallalang dan Bendesa Pakraman Tegallalang di Kantor Camat untuk mempertemukan pihak terkait dan membicarakan permasalahan yang terjadi, pihak pengelola berusaha memberikan pengertian melihat kunjungan wisatawan yang turun bahkan membuat pihak pengelola terpaksa menutup objek wisata untuk mengurangi biaya pemeliharaan serta gaji pegawai badan pengelola. Sehingga disepakati selama pandemi berlangsung, pihak pengelola melakukan pembayaran 3 bulan sekali sebesar Rp 4,500,000 sesuai dengan kompensasi terakhir.

### **INTERAKSI BPOWC DENGAN PENGUSAHA RESTAURANT DI OBJEK WISATA CEKINGAN**

Objek Wisata Cekingan, selain terdapat petani di dalam pengelolaannya, adanya kawasan bisnis yang dibangun tepat di Desa Tegallalang. Kawasan tersebut meliputi restaurant, café, artshop. Letaknya di sisi barat Objek Wisata Cekingan. Di seberang jalan berjejer artshop hampir di sepanjang

jalan masuk hingga pintu keluar objek wisata. Kawasan yang di khususkan untuk kawasan komersil, sebelum adanya objek wisata Cekingan, lahan ini masih berupa tebing dan dibagian bawah masih menjadi sawah, tetapi karena peningkatan jumlah wisatawan, semakin dikenalnya Cekingan sebagai objek wisata, sehingga lama kelamaan pembangunan mulai dilakukan.

Namun sebelum adanya badan pengelola, pembangunan di kawasan tersebut masih tidak tertata, bangunan yang masih semi permanent serta, tata letak bangunan yang tidak baik membuat kawasan tersebut menjadi terkesan kumuh.

Pecingkremen adalah peraturan yang dibentuk oleh desa Pakraman dengan melakukan sangkep untuk membentuk pecingkremen. Kepada BPOWC pihak pemilik usaha membayar kompensasi sebesar Rp 60.000,00 per bulannya, biaya ini digunakan untuk pembayaran biaya view ke petani. Selain pembayaran uang kompensasi, biaya kebersihan juga menjadi kewajiban setiap bulannya. Dalam pemungutan biaya tersebut, hanya dikenakan bagi penyewa yang berasal dari luar Desa Tegallalang, jika masyarakat Desa Tegallalang mempunyai toko di kawasan tersebut hanya dikenakan biaya kebersihan setiap bulannya.

BPOWC selaku pihak pengelola membuat peraturan yang tertera dalam peraturan BPOWC terkait bentuk bangunan. Peraturan tersebut dibentuk agar pihak pemilik usaha dapat menjaga kerapian di kawasan Objek Wisata Cekingan. Tetapi jika terdapat pihak pengusaha yang tidak mengikuti aturan tersebut maka dilakukan teguran dari pihak BPOWC. Membahas mengenai tata letak

bangunan yang ada dikawasan Objek Wisata Cekingan, terdapat bangunan semi permanent yang dibangun dan menghalangi view di Cekingan, sehingga pihak pengelola dan bendesa Pakraman mengajak pihak kepolisian untuk menegur pemilik agar tidak membangun dikawasan tersebut.

Pembentukan kebijakan mengenai pembebasan pembangunan bagi pemilik lahan, pada awalnya memang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat agar perekonomian masyarakat sekitar semakin berkembang tetapi hal ini juga menjadi alasan cukup sulit bagi BPOWC untuk menertibkan bangunan yang masih tidak mengikuti aturan BPOWC, hal ini juga dikarena privatisasi lahan yang dilakukan oleh pihak pihak yang justru mengambil keuntungan, dengan menyewakan lahan mereka tanpa harus membayar kepada pihak pengelola, jika dilihat lagi kawasan tersebut merupakan kawasan strategis untuk melihat view sawah tetapi minimnya kontribusi pihak pemilik lahan ke pihak pengelola menjadikan kawasan tersebut terkesan tumpang tindih dengan satu dan yang lainnya.

## **INTERAKSI BPOWC DENGAN KOMUNITAS LUDEN HOUSE**

Perkembangan pariwisata di daerah tersebut membuat banyaknya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi villa dan café. Minat alih fungsi lahan yang tinggi membuat banyaknya kawasan pertanian yang digantikan dengan kawasan bisnis. Tidak terkecuali dengan lahan sawah di sebelah barat Objek Wisata Cekingan. Perubahan lahan pertanian menjadi kawasan bisnis menjadi tujuan Gede Suanda founder

komunitas Luden House yang berlokasi di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.

Komunitas Luden House merupakan komunitas yang concern terhadap permasalahan lingkungan dan perubahan sosial. Tujuan awal dibentuknya komunitas ini adalah menyuarkan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial dengan menggunakan alat kesenian. Kesenian dipilih sebagai alat menyuarkan karena Gede Suanda atau yang akrab dipanggil dengan Gede Sayur beranggapan bahwa seni merupakan salah satu sarana untuk mengungkapkan aspirasi tanpa harus menggunakan kekerasan. Seni dapat masuk kedalam seluruh aspek kehidupan sehingga, pemilihan seni untuk menyuarkan perubahan dianggap alasan yang tepat bagi Gede Sayur. Salah satunya adalah pembuatan seni bertemakan Not for Sale dan agar lebih relevan dalam permasalahan alih fungsi lahan yang banyak terjadi di Kecamatan Ubud maka Gede Sayur bersama teman-teman komunitasnya membuat brand Bali Not For Sale dalam melakukan protes melalui seni dengan memasang papan Bali Not For Sale di kawasan lahan persawahan Objek Wisata Cekingan.

Dalam pemasangan art project tersebut, Gede Sayur sempat bertemu dengan salah satu petani penggarap yang dimana pada percakapan tersebut petani mengeluhkan mengenai praktek pengelolaan Objek Wisata Cekingan yang tidak adil terhadap petani salah satunya yaitu dalam pemberian kompensasi dari pihak pengelola, saat itu pihak pengelola memberikan sebesar Rp 500,000 ke 7 orang petani dan terjadi penunggakan pembayaran oleh pihak

pengelola selama 3 bulan. Kemudian Gede Sayur menawarkan untuk melakukan kerja sama dengan melakukan pemasangan art project, dan disetujui sehingga, dalam proses pembuatannya beliau selaku petani yang bernama Wayan Klas memberikan bahan baku berupa bambu yang diambil dari kebun Pak Wayan, dalam proses pembuatannya Gede Sayur bersama teman-teman melakukan art camping di Cekingan selama 2 minggu.

Protes yang dilakukan dengan memasang karya seni ini menjadi pilihan yang dibuatnya untuk menunjukkan aspirasinya dalam kekhawatiran Gede Suanda terkait alih fungsi lahan yang semakin tidak terkontrol. Makna dari tulisan *Bali Not For Sale* itu sendiri berarti Bali tidak diperuntukan untuk dijual, yang diperuntukan bagi para investor-investor lahan dan pelaku bisnis untuk menggantikan lahan pertanian menjadi kawasan bisnis. Pemasangan papan tersebut juga menjadi jembatan aspirasi bagi kelompok petani di Desa Kedisan karena melihat maraknya pembangunan yang justru dilakukan di bagian sisi barat objek wisata.

Pemasangan yang berada tepat ditengah pemandangan Objek Wisata Cekingan juga bertujuan agar terlihat oleh para pengunjung Objek Wisata Cekingan dan saat itu Gede Suanda sudah mendapatkan ijin dari pihak pemilik sawah. Namun pemasangan papan tersebut tidak sampai bertahan 1 hari, hal ini karena pihak pengelola dan Bendesa Pakraman Tegallalang merasa terganggu dalam pemasangan papan tersebut, sehingga belum sehari dipasang sudah diturunkan oleh pihak pengelola, bendesa Pakraman dan dibantu kepolisian.

## **ANALISIS KAJIAN**

Perkembangan objek wisata menjadi salah satu aspek positif dalam proses pengelolaannya, penambahan wisatawan yang meningkat menjadi salah satu bukti bahwa memang kolaborasi diperlukan dalam pengelolaan terutama dalam pengelolaan objek wisata. Dalam konsep penelitian yaitu Desa Pakraman Tegallalang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang terdapat di desanya. Hal ini juga didukung dengan Perda Pemerintah Daerah No 10 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Desa Pakraman Tegallalang berhak untuk mengelola seluruh aspek di dalam Objek Wisata Cekingan, Kepentingan dan kesamaan visi misi menjadikan kolaborasi antara desa pakraman dengan pihak badan pengelola dapat tercapai, proses yang mengutamakan dialog dan komunikasi ini dijalankan pihak desa pakraman dan pengelola untuk dapat membentuk sebuah kebijakan mengenai objek wisata.

Pada konflik yang muncul antara interaksi pengelola dengan pihak petani mengenai kompensasi saat pandemi, dilakukan pertemuan yang juga melibatkan pihak Camat Tegallalang, dalam pertemuan tersebut yang diikuti oleh perwakilan dari 7 petani, pihak pengelola, Camat Tegallalang dan Bendesa Pakraman, duduk bersama untuk mengurai permasalahan yang terjadi antara 2 pihak terkait, pada saat itu pertemuan dilakukan di Kantor Camat Tegallalang, dalam pertemuan tersebut pihak petani memberikan alasan mereka mengenai pemasangan seng dan cermin, dan mengeluhkan penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pengelola selama hampir 4 bulan lamanya.

Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa kompensasi akan dibayarkan kepada pihak petani namun karena selama pandemi adanya penutupan objek wisata sehingga tidak adanya pemasukan ke pihak pengelola, pada pertemuan tersebut disepakati untuk pembayaran sewa lahan dilakukan 3 bulan sekali dengan jumlah Rp 4,500,000.

Dalam hal ini, keterlibatan pihak Desa Kedisan yang merupakan wilayah diluar Desa Tegallalang dan memiliki bendesa tersendiri, dalam pengelolaan objek wisata, pihak pengelola hanya melibatkan petani yang berada di wilayah tersebut, baik pihak bendesa, banjar Desa Kedisan tidak ikut terlibat di dalamnya, pihak pengelola sendiri juga mengatakan bahwa dalam pengelolaannya mereka hanya melibatkan masyarakat Desa Pakraman Tegallalang. Pada penyelesaian konflik yang terjadi pun pihak Desa Kedisan hanya diwakili oleh perwakilan dari petani dari banjar Kebon, Desa Kedisan. Sehingga dalam penyelesaian konflik yang terjadi pihak Desa Pakraman melibatkan Camat Tegallalang untuk dapat ikut dalam mencari jalan keluar mengenai konflik petani dengan pihak pengelola, jika di analisa dalam keterlibatan camat tegallalang dan bendesa pakraman dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, dengan melakukan pertemuan tatap muka untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, komunikasi merupakan hal terpenting dalam setiap penyelesaian masalah yang terjadi. Sehingga dalam analisis, peneliti melihat bahwa mengurai konflik yang terjadi antara pihak pengelola dengan pihak petani yang dibantu oleh camat dan bendesa Tegallalang, komitmen mereka tentu saja agar tidak terjadi

perselisihan yang justru melibatkan 2 masyarakat desa yaitu Desa Kedisan dan Desa Tegallalang. Sehingga ditemukan kesepakatan pihak pengelola melakukan pembayaran kompensasi setiap 3 bulan sekali dengan jumlah sebesar Rp 4,500,000.

Collaborative governance juga mengedepankan kepercayaan yang dijalankan sebagai proses kolaborasi, dimana dalam penentuannya bendesa pakraman mempercayakan masyarakat Desa Tegallalang dalam BPOWC dengan satu visi misi yang sama yaitu ingin memajukan objek wisata dan mengelola bersama Objek Wisata Cekingan. Namun dalam proses setiap kolaborasi tentu akan mengeluarkan kebijakan yang seharusnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaannya, baik itu masyarakat dari Desa Tegallalang maupun yang bukan berasal dari desa Tegallalang namun masih bagian dari Objek Wisata Cekingan .

Seperti pada halnya dalam hasil temuan interaksi BPOWC dengan Petani yang terdapat konflik, di dalam pengelolaan objek wisata. Ketimpangan kebijakan yang justru masih menjadi permasalahan terutama pada pemberian kompensasi. Selain mengikutsertakan masyarakat Desa Pakraman Tegallalang dalam kolaborasi, jika saja pihak pengelola dan desa pakraman memberikan kesempatan bagi masyarakat Desa Kedisan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan, sehingga dapat meredakan konflik yang ada. Komunikasi antara kedua yang juga masih belum terjalin secara baik, menjadi faktor utama dimana hasil dari collaborative governance belum diterapkan secara sempurna, jika saja melibatkan

masyarakat Desa Kedisan dalam pengelolaannya, mungkin akan lebih mengurai konflik yang sering terjadi antara pihak pengelola dengan petani, karena dalam hasil temuan petani justru akan senang jika dilibatkan langsung dalam pengelolaan dan tidak hanya sekedar penerima kompensasi.

Perda no 16 tahun 2012-2032 mengenai pengelolaan objek wisata, juga menjadi dasar untuk pihak pengelola dalam membangun sarana dan prasarana yang ditujukan sebagai penunjang pariwisata khususnya di Objek Wisata Cekingan, dari hasil penelitian bahwa pihak pengelola membangun jembatan untuk sarana tracking yang dikhusus dibuat untuk para wisatawan, sehingga semakin menarik minat pengunjung, namun dalam perda tersebut juga menekankan penghijauan dimana dalam hasil temuan, justru lahan persawahan sudah beralih fungsi menjadi bangunan restaurant dan artshop, yang belum sesuai sebagaimana dalam perda tersebut.

Rapuhnya kolaborasi yang dilakukan juga disebabkan karena stakeholder dari Desa Kedisan yang tidak terlibat dalam pengelolaan objek wisata, sehingga konflik yang terjadi antara pihak pengelola dan petani terjadi berulang kali, Jika menganalisis dengan Teori Ekonomi Karl Marx, berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan bagaimana masyarakat kapitalis membentuk kelas-kelas sosial yang justru dapat menimbulkan konflik. Terbentuknya masyarakat kapitalis dalam Objek Wisata Cekingan terlihat pihak pemilik modal yaitu pengusaha restaurant dengan modal tanahnya, bebas membangun tanah mereka untuk keperluan ekonomi, mereka masuk kedalam kelas bourgeois yang menurut Karl Marx merupakan kelas yang memiliki

modal baik itu uang, maupun tanah. Pembangunan yang terus dilakukan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dengan memanfaatkan pemandangan sawah sebagai view restaurant mereka.

Karl Marx juga menyebutkan bahwa sistem kapitalisme justru akan menimbulkan eksploitasi baik itu bagi pekerja maupun lingkungan. Dalam penelitian ini melihat eksploitasi dan alih fungsi lahan dimana pengusaha restaurant membangun diatas lahan pribadi mereka demi keuntungan dan kepentingan pribadi tentu akan berdampak pada lahan yang berganti menjadi bangunan, sawah yang sebelumnya masih asri, tebing-tebing menjulang tinggi menambahkan keindahan alam yang dimiliki, bahkan menjadi daya tarik lebih jika turis berkunjung ke objek wisata, namun saat ini sudah menjadi bangunan-bangunan baik restaurant maupun artshop yang dibangun atas dasar pencarian keuntungan demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Sehingga menjadi pemandangan yang kurang menarik karena pembangunan yang justru terkesan tumpang tindih.

Dari hasil temuan peneliti, melihat interaksi BPOWC dengan petani, dimana peneliti menganalisis bahwa pihak BPOWC merupakan kelas borjuis yang menanam modal untuk pembangunan Objek Wisata Cekingan, perolehan laba sebesar-besarnya, dengan pembangunan sarana-prasarana yang diupayakan oleh pihak pengelola mendatangkan semakin banyak wisatawan dan meningkatnya penjualan tiket di objek wisata, untuk kepentingan pihak Desa Pakraman, hal ini karena dalam pembagian hasil dari distribusi penjualan tiket, biaya

parkir, lebih banyak di salurkan ke pihak Desa Pakraman yaitu sebesar 35%. Namun sayangnya jika melihat bagaimana kejadian mengenai pemasangan seng yang menjadi bentuk protes petani dengan pengelola, tentu terlihat bagaimana ketidakadilan pihak pengelola dalam pembagian distribusi hasil dari penjualan tiket, dll.

Menurut Karl Marx kaum borjuis berusaha mengambil hak kaum proletar dengan memberikan upah minim demi keuntungan yang lebih besar, dari luas wilayah kawasan pertanian di Objek Wisata Cekingan, BPOWC melakukan perjanjian dengan 7 pihak petani, dan masing-masing saat ini mendapatkan Rp 4.500.000 yang dibayarkan/bulan, namun petani beranggapan bahwa hal tersebut masih belum sepadan melihat bagaimana pihak pengelola 100% memanfaatkan view sawah mereka untuk kepentingan objek wisata. Teori Karl Marx juga menyatakan bahwa dalam pembentukan kelas akan muncul konflik antar kelas. Konflik akan memunculkan kesadaran kelas dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, dalam teorinya Karl Marx menyebutkan bahwa setelah terbentuknya kelas sosial dalam tatanan masyarakat maka akan muncul konflik antar proletar dan borjuis yang menuntut kepentingan mereka, diantaranya kepentingan kenaikan upah.

Di hasil temuan penelitian ini, pihak petani menyadari bahwa mereka sebagai pihak yang memberikan view kepada pihak pengelola, merasa bahwa kepentingan mereka harus terpenuhi, dan petani memilih jalan dengan melakukan protes pemasangan seng/ cermin di persawahan mereka, lahan mereka berada di sisi barat objek wisata dan menghadap ke

timur, biasanya pengunjung akan datang di pagi-sampai sore hari sebelum matahari tenggelam, tentu pantulan sinar dari seng/cermin akan memantulkan cahaya dari matahari dari timur sehingga mengganggu pandangan wisatawan yang berkunjung.

Bentuk protes mereka menjadi titik kesadaran dimana mereka perlu menuntut kepentingannya, dan sehingga muncul pertentangan antara pihak pengelola dengan pihak petani, sehingga dalam teori Karl Marx bahwa konflik tidak semata-mata muncul di dalam kehidupan sosial. Karl Marx menyebutkan dalam teorinya bahwa kelas proletar bisa saja masuk ke dalam kelas bourjuis, tentu dengan perubahan kelas, dimana tingkat kesadaran kelas proletar membuat mereka ingin mengubah tatanan masyarakat tanpa kelas baik dengan cara damai maupun kekerasan.

Tetapi didalam hasil penelitian ini, kelas proletar atau petani hanya sampai titik dimana mereka menyadari bahwa perlu adanya protes untuk kepentingan mereka, namun tidak sampai berusaha untuk masuk kedalam tatanan borjuis ataupun perubahan tatanan masyarakat, karena pihak petani merasa untuk tidak perlu meributkannya, mereka merasa jika tuntutan mereka sudah terpenuhi sudah cukup bagi mereka. Mereka tidak ingin memperpanjang permasalahan, kembali lagi bahwa objek wisata ini melibatkan 2 masyarakat adat, karakteristik masyarakat adat Bali yang tidak ingin memperpanjang permasalahan, masyarakat desa di Bali yang menjunjung tinggi konsep Tri Hita Karana yaitu menjaga keseimbangan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya,

menjadi tumpuan bahwa tidak perlu adanya permasalahan panjang jika memang tuntutan sudah terpenuhi agar terciptanya keseimbangan manusia dengan manusia. Sehingga karakteristik masyarakat ini yang menjadikan perubahan tantangan sosial di dalam pengelolaan Objek Wisata Cekingan akan tetap seperti itu, namun kembali lagi Karl Marx menyatakan bahwa kelas proletar bisa menjadi kelas borjuis dengan usaha-usaha mereka, karena kelas bisa saja berubah dan justru dapat meruntuhkan sistem yang menjadi awal mula terbentuknya kelas dalam masyarakat sosial. Karakteristik masyarakat juga menentukan bagaimana perubahan dalam tatanan masyarakat.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif mengenai interaksi aktor dalam pengelolaan Objek Wisata Cekingan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut;

Pertama, penerapan konsep collaborative governance yang masih belum diterapkan secara maksimal oleh pihak pengelola dan desa Pakraman, dalam pembentukan kebijakan terkait pengelolaan objek wisata. Sehingga timbul gerakan dari pihak civil society yaitu Luden House (Gede Sayur) dalam membuat papan dengan tulisan Bali Not For Sale dan menjembatani keinginan pihak petani dalam pemberian kompensasi yang diberikan oleh pihak pengelola. Lemahnya kolaborasi yang diterapkan karena minimnya keterlibatan stakeholder dari Desa Kedisan dalam pengelolaan Objek Wisata Cekingan menjadikan konflik terus terjadi secara berulang, sehingga pada penyelesaiannya dilakukan mediasi di Kantor

Camat Tegallalang bersama Camat, Bendesa Pakraman Tegallalang, Ketua BPOWC dan perwakilan 7 petani.

Kedua, terbaginya dua kelas dalam pengelolaan Objek Wisata Cekingan yaitu Kelas Borjuis; Bendesa pakraman Tegallalang, BPOWC, Dewa Putu Oka dan pengusaha yang memiliki modal dan memanfaatkan hasil kerja petani, kelas Proletar yaitu petani dan timbul konflik antar kedua kelas tersebut karena tuntutan kenaikan kompensasi, dan mendapatkan keuntungan paling sedikit sehingga petani menjadi bagian terbawah dalam pengelolaan Objek Wisata Cekingan untuk sebuah pariwisata, kesadara akan pentingnya posisi mereka muncul karena konflik tersebut, mereka merasa seharusnya posisi mereka diutamakan dalam pengelolaan karena mereka yang memelihara sawah yang menjadi view Wisata Cekingan dan dapat dilibatkan dalam pengelolaan agar tidak hanya pemberian kompensasi, namun mereka berusaha tidak memperpanjang permasalahan jika tuntutan mereka sudah terlaksana, sehingga perubahan dalam tatanan masyarakat akan tetap sama.

## **SARAN**

1. Memberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas dengan mengutamakan masyarakat pemilik lahan di Objek Wisata Cekingan baik yang berasal dari Desa Tegallalang maupun Desa Kedisan. Hal tersebut penting karena setiap kebijakan dan aktivitas wisata akan berhubungan dengan masyarakat tersebut. Selain itu juga untuk meningkatkan ketergantungan akan keberadaan Objek Wisata Cekingan dan meningkatkan rasa

tanggung jawabnya dalam menjaga keberlanjutan Objek Wisata Cekingan.

2. Mengikuti sertakan pemerintah daerah dalam penertiban bangunan, BPOWC merasa tidak memiliki kekuatan untuk itu sehingga, saran peneliti untuk melibatkan pemerintah daerah agar pembangunan di kawasan objek wisata menjadi lebih tertata dan dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan untuk mengurai konflik yang kerap terjadi diantara 2 desa tersebut.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Arizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.

Arifin, Bustanul. 2001. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*: Gramedia Widiasarana.

Budiarjo, Mariam.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama Huda.

Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Damanhuri, Didin. *Ekonomi Politik dan Pembangunan*. Jakarta. IPB Press.

Doyle, Paul Jhonson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia

Darsoprajitno, Soewarno. *Ekologi Pariwisata*. Bandung: Angkasa

Islamy, La Ode. 2008. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Kingdon, John W. 2003. *Agendas, Alternatives, and Publik Policies*. New York: Addison-Wesley Educationnal Publishers.

Moelong, Lexy. 2006 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.

Marsh, David dan Stoker, Gerry. 2010. *Teori dan Metode Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media

Narwoko, J Dwi dan Suyanto, Bagong. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana

Yustika, Ahmad. 2020. *Ekonomi Politik Pijakan Teoritis dan Kajian Empiris*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras.

### Jurnal;

Ansell and Gash. 2008. *Collaborative Governance In Theory and Practic*. Berkeley: University of California. Hal: 545

Adikampana, I Made. 2012. "Optimalisasi Kontribusi Pariwisata Cekingan Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal", Jurnal Ilmiah Pariwisata, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2012 Hal 217-222.

Dillarad, Dudley .1988. *The Barter Illusion in Classical and Neoclassical Economics*. Eastern Economics Journal Vol. XIV, No. 4. Hal: 309

Leano Monkogogi. 2017. *Community, state and power-relations in community-based tourism on Lekhubu Island, Botswana*, Tourism Geographies, 19:3, 483-501

Muliana, I Wayan. 2016. "Penataan Kawasan Objek Wisata Cekingan", Jurnal Skripsi

